



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2022

**KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia yang diberikan sehingga dapat terselesainya salah satu kegiatan pembuatan Laporan Pelaksanaan Tugas Camat Jumapolo Tahun Anggaran 2022.

Laporan Pelaksanaan Tugas Camat Jumapolo Tahun Anggaran 2022 secara umum berisi tentang program, kegiatan, dan hasil yang dicapai serta inventarisasi permasalahan yang terjadi. Hal tersebut dikandung maksud sebagai bukti administrasi Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati dan sekaligus merupakan dokumen yang sangat berguna dalam rangka penyusunan program dan kebijakan di tahun berikutnya.

Tersusunnya laporan ini berkat kerja sama dan koordinasi berbagai pihak. Untuk itu melalui media ini kami sampaikan rasa terima kasih teriring doa semoga atas budi baik yang diberikan menjadi amal jariyah dan mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Kami menyadari Laporan pelaksanaan Tugas ini sudah barang tentu banyak kekurangan dan kesalahan, karena terbatasnya kemampuan, kritik membangun sangat diharapkan demi tercapainya kesempurnaan.

Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

Jumapolo, Januari 2023

CAMAT JUMAPOLO,

HARYANTO. S.E.,M.A.P.

Pembina

NIP. 196705141989031011

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
BAB II DISKRIPSI SKPD	3
A. Tugas Pokok dan Fungsi	3
B. Jumlah Program	3
C. SOP	3
D. Perda / Perrbub	3
B. Struktur Organisasi	3
D. Kepegawaian	6
BAB III CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAH DAERAH	9
A. Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022	9
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	9
C. Permasalahan dan Solusi	9
BAB IV HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	12
A. Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Wajib	12
B. Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Pilihan	12
BAB V CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	22
A. Tugas yang diterima	22
B. Tugas yang diberikan	22
BAB VI PENERAPAN DAN CAPAIAN STANDAR LAYANAN MINIMAL KECAMATAN	22
A. Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban.....	23
BAB VII INOVASI DAN DAN PENGHARGAAN	24
A. Inovasi	24
B. Penghargaan	24
BAB VII PENUTUP	26
1. Kesimpulan	26
2. Saran	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang selanjutnya disebut Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati, sehingga berkewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

di Wilayah Kerja Kabupaten Karanganyar, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar yang ditindaklanjuti pula dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan sebagai petunjuk pelaksanaan operasionalnya.

Kecamatan Jumapolo memiliki Luas Wilayah 5.567,021 Ha dengan jumlah penduduk 44.762 jiwa yang terbagi dalam 12 Desa, 103 Dusun, 112 Rw dan 308 RT.

B. DASAR HUKUM

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Struktural : Undang-undang No 22 Tahun 1999
4. Landasan Operasional :
 - a. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar
 - b. Peraturan Bupati Karanganyar No 117 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

- c. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022
- d. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- e. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.
- f. Rencana Kerja Kecamatan Jumapolo Tahun 2022

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Kepala Unit Kerja merupakan laporan pencapaian program dan kegiatan OPD Kecamatan Jumapolo yang didasarkan pada Rencana Kerja Tahunan tahun 2022.

Laporan Pelaksanaan tugas ini untuk mengkomunikasikan pencapaian indikator tahunan OPD Kecamatan Jumapolo yang dikaitkan dengan Proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Camat ini mengandung maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. Maksud:

- 1. Sebagai bukti administratif Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati Karanganyar terkait pelaksanaan Program dan kegiatan Kecamatan Jumapolo;
- 2. Sebagai dokumen / bahan acuan dalam rangka penyusunan program dan kebijakan di tahun berikutnya.

b. Tujuan:

- 1. Evaluasi terhadap program kerja yang telah direncanakan;
- 2. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan tugas di lapangan;
- 3. Mengetahui peluang yang bisa dimanfaatkan bagi pencapaian program kerja berikutnya.

BAB II

DISKRIPSI UNIT KERJA

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat diatur menurut ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 3 Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 dan juga diatur dalam Bab III Bagian Kesatu Pasal 4 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, menyebutkan bahwa Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Dan Pasal 5 menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, maka Kecamatan mempunyaifungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
4. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar

1. Program Pembangunan dan Pengembangan Wilayah

C. Standard Operating Procedure (SOP) Kecamatan Jumapolo

SOP Kecamatan Jumapolo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. SOP Tentang Pelayanan non Perijinan KTP, KK, Akte Kelahiran;
- b. SOP Tentang umum SKCK, Pindah Tempat;
- c. SOP Tentang Perijinan,TDG, IUMK.

D. Perda/perbub yang berkaitan dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Jumapolo tertuang dalam DPA Perubahan Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. (beserta perubahannya dicantumkan, perda dan perbup)

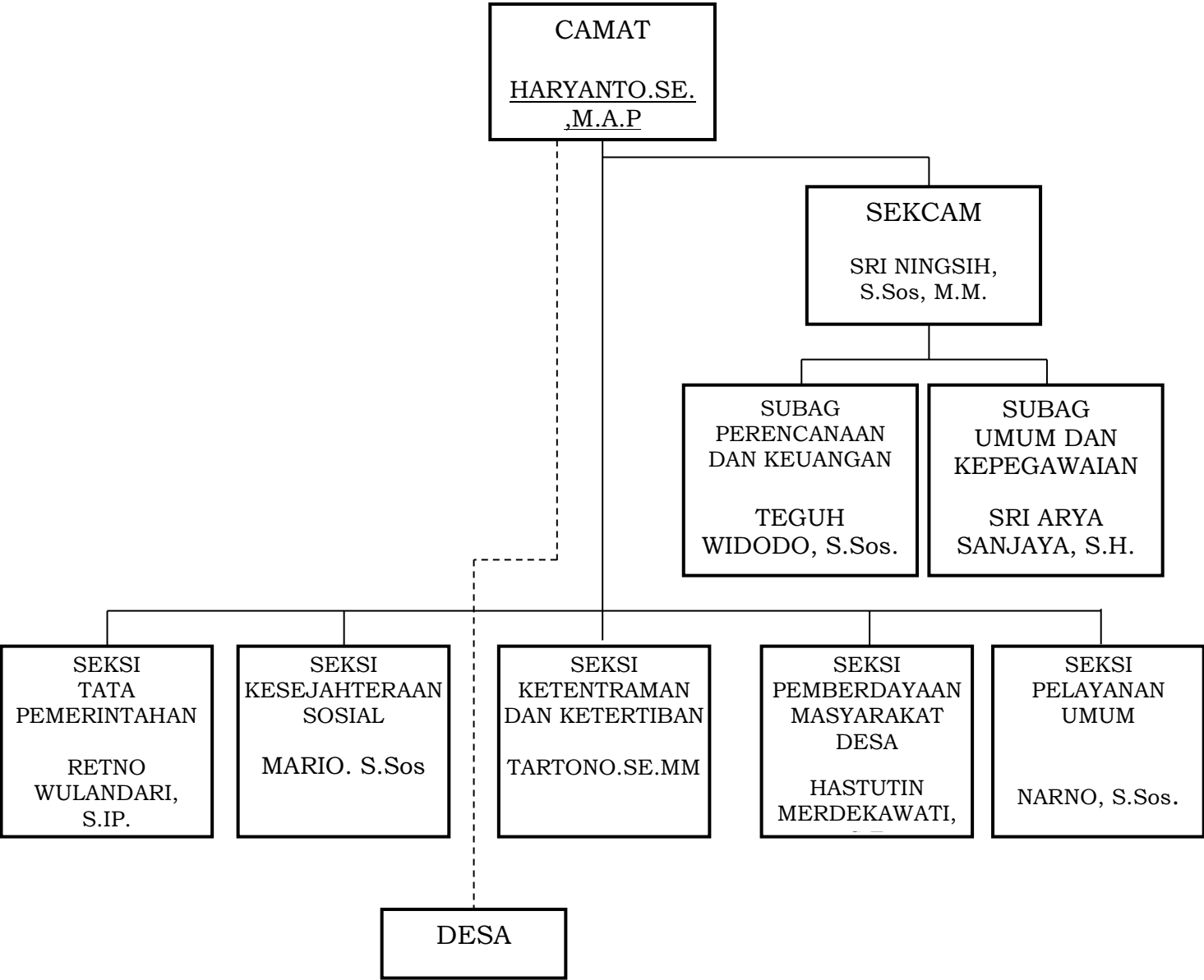
E. Struktur Organisasi

Kecamatan di Wilayah Kerja Kabupaten Karanganyar, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar yang ditindaklanjuti pula dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan sebagai petunjuk pelaksanaan operasionalnya.

Struktur organisasi Kecamatan Jumapolo terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi;
 - 1). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN JUMAPOLOBERDASARKAN
PERDA NO. 4 TAHUN 2009**



Ket : ____Garis Komando
-----Garis Koordinasi

F. Kepegawaian Berdasarkan Urusan yang dilaksanakan

Keadaan Kepegawaian di Kantor Kecamatan Jumapolo keadaan sampai dengan per tahun 2022 dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

TABEL I
Daftar Pegawai Kantor Kecamatan Jumapolo Tahun 2022

NO	NAMA	NIP	STATUS KEPEGAWAIAN (PNS/CPNS)	PANGKAT / GOL RUANG
1	2	3	4	5
1	HARYANTO.SE.,M.A.P	19670514 198903 1 011	PNS	Pembina / IV.a
2	SRI NINGSIH, S.Sos, M.M	19670523 198901 2 002	PNS	Pembina / IV.a
3	RETNO WULANDARI, S.IP.	19701212 200003 2 008	PNS	Pembina / IV.a
4	HASTUTIN MERDEKAWATI, S.E.	19800817 201001 2 026	PNS	Penata Tk.I / III.d
5	TARTONO. SE.MM.	19660920 199103 1 008	PNS	Penata Tk.I / III.d
6	NARNO, S.Sos.	19710125 199403 1 004	PNS	Penata Tk.I / III.d
7	MARIYO. S.Sos	19760130 200701 1 008	PNS	Penata Muda Tk.I / III.b
8	SRI ARIYA SANJAYA, S.H	19840610 201001 1 028	PNS	Penata/III.c
9	TEGUH WIDODO, S.Sos	19760817 200701 1 013	PNS	Penata Muda Tk.I / III.b
10	ERFIANTO DWI PRASETYO, S.H	19811112 200604 1 011	PNS	Penata III.c
11	SUMARSO	19660308 199003 1 012	PNS	Penata Tk.I / III.d
12	SUHARTINI	19780430 200312 2 007	PNS	Penata Muda III.a
13	SUPARNO	19670315 200701 1 027	PNS	Pengatur Tk I / II.d
14	AGUNG SULARDI	19771028 200701 1 009	PNS	Pengatur Tk I / II.d
15	SUTARDI	19680315 200701 1 051	PNS	Pengatur Tk I / II.d
16	IRAWAN TEJO NUSANTORO	19730308 201001 1 002	PNS	Pengatur II.c

Tabel. II
Daftar Pejabat Struktural Kecamatan Kumapolo

No	NAMA	JABATAN	MEMENUHI PERSYARATAN DIKLAT PIM	MEMENUHI PERSYARATAN KEPANGKATAN
1	HARYANTO.SE.,M.A.P	Camat	V	V
2	SRI NINGSIH, S.Sos, M.M	Sekretaris Camat	V	V
3	RETNO WULANDARI, S.I.P	Kasi Tata Pemerintahan	V	V
4	HASTUTIN MERDEKAWATI,S.E	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	V	V
5	NARNO, S.Sos	Kasi Pelayanan Umum	V	V
6	TARTONO,SE.MM	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	V	V
7	MARIYO, S.Sos	Kasi Kesejahteraan Sosial	V	V
8	TEGUH WIDODO, S.Sos	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	V	V
9	SRI ARYA SANJAYA, S.H	Kasubag Umum dan Kepegawaian	V	V

Tabel. III
Daftar Pejabat Struktural yang belum terisi

NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON
	NIHIL	

Tabel. IV
Daftar Pejabat Fungsional Umum Kecamatan Jumapolo

NO	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL
1	ERFIANTO DWI PRASETYO, S.H	198111122006041011	Pengelola pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	SUMARSO	196603081990031012	Pelaksana Kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum
3	SUHARTINI	197804302003122007	Pengelola Sarana dan Prasarana pada Subag Umum dan Kepegawaian
4	SUPARNO	196703152007011027	Pengadministrasi Umum pada Subag Umum dan Kepegawaian
5	AGUNG SULARDI	197710282007011009	Pengelola pada Seksi Tata Pemerintahan
6	SUTARDI	196803152007011051	Pengelola pada Seksi Kesejahteraan Sosial
7	IRAWAN TEJO NUSANTORO	197303082010011002	Pelaksana pada Seksi Keamanan dan Ketertiban

Tabel. V
Daftar Pejabat Fungsional Umum yang belum terisi

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH	KET
1	Pelaksana pada Subag Perencanaan dan keuangan	1	
2	Pengadministrasi Keuangan pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	
3	Satuan Pengamanan Kantor pada Sub Bag Umum dan Kepegawaian	1	
4	Resepsionis pada Sub Bag Umum dan Kepegawaian	2	

BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR

NO	IKK OUT PUT	IKK OUT COME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA (OPD)
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

NO	IKK OUT PUT	IKK OUT COME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA (OPD)
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

NO	IKK OUT PUT	IKK OUT COME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA (OPD)
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

D. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NO	IKK OUT PUT	IKK OUT COME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA (OPD)
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

E. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
	NIHIL		

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Nihil

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PILIHAN

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Anggaran: Rp. 900.000,00 Realisasi: Rp. 900.000,00 Persentase: (100%)	Dokumen RKA OPD 1 Dokumen	1 Dokumen (100.00%)	-	-
				2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Anggaran: Rp. 1.780.000,00 Realisasi: Rp. 1.655.000,00 Persentase: (92,98%)	Dokumen RKA OPD 1 Dokumen	1 Dokumen (100.00%)		

				3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran: Rp. 900.000,00 Realisasi: Rp. 900.000,00 Persentase: (100,00%)	Laporan Realisasi 100%	100 % (100.00%)		
				4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 900.000,00 Realisasi: Rp. 900.000,00 Persentase: (100,00%)	Dokumen LKJIP OPD 1 Dokumen	1 Dokumen (100.00%)		
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 1.847.893.750,00 Realisasi: Rp. 1.737.364.224,00 Persentase: (94,02%)	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang	16 Orang (100.00%)		
			c. Administrasi Umum	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran: Rp. 2.000.000,00 Realisasi: Rp. 1.962.000,00 Persentase: (98,10%)	Terbayarnya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		

				2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran: Rp. 6.630.000,00 Realisasi: Rp. 6.518.800,00 Persentase: (98,32%)	Terbayarnya Perlengkapan dan Peralatan Kantor 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
				3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Anggaran: Rp. 2.000.000,00 Realisasi: Rp. 1.812.200,00 Persentase: (99,96%)	Terbayarnya Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
				4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Anggaran: Rp. 7.320.000,00 Realisasi: Rp. 7.293.400,00 Persentase: (99,64%)	Terbayarnya Bahan Logistik Kantor 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
				5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Anggaran: Rp. 5.000.000,00 Realisasi: Rp. 4.758.650,00 Persentase: (95,17%)	Terbayarnya Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		

		6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Anggaran: Rp. 2.280.000,00 Realisasi: Rp. 1.760.000,00 Persentase: (77,19%)	Terbayarnya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
		7) Fasilitasi Kunjungan Tamu Anggaran: Rp. 22.600.000,00 Realisasi: Rp. 19.740.000,00 Persentase: (87,35%)	Terbayarnya jamuan makanan dan minuman 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
		8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran: Rp. 60.230.000,00 Realisasi: Rp. 59.367.500,00 Persentase: (98,57%)	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
	d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 116.650.000,00 Realisasi: Rp. 111.575.000,00 Persentase: (95,65%)	Terbayarnya Mebelair dan Komputer 2 Kegiatan	2 Kegiatan (100.00%)		

			e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran: Rp. 900.000,00 Realisasi: Rp. 900.000,00 Persentase: (100,00%)	Terbayarnya Jasa Surat Menyurat 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
				2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran: Rp. 18.720.000,00 Realisasi: Rp. 15.531.377,00 Persentase: (82,97%)	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan, Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 %	12 Bulan, 100 % (100.00%)		
				3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran: Rp. 285.160.000,00 Realisasi: Rp. 283.250.000,00 Persentase: (99,33%)	Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor 18 Orang	18 Orang (100.00%)		

			f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran: Rp. 40.000.000,00 Realisasi: Rp. 37.787.413,00 Persentase: (94,47%)	Terbayarnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 9 Kendaraan	9 Kendaraan (100.00%)		
				2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 8.660.000,00 Realisasi: Rp. 7.030.000,00 Persentase: (81,18%)	Peralatan dan Mesin Yang Memadai 6 Jenis	6 Jenis (100.00%)		
				2) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran Rp. 49.410.000,00 Realisasi Rp. 46.613.500 Persentase (94,34 %)	Terpeliharanya Gedung Kantor	2 Kegiatan (100 %)		

			g. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Anggaran: Rp. 500.000,00 Realisasi: Rp. 500.000,00 Persentase: (100,00%)	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat 1 Dokumen	1 Dokumen (100.00%)		
				2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Anggaran: Rp. 500.000,00 Realisasi: Rp. 500.000,00 Persentase: (100,00%)	Kegiatan Legalisasi 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
			h. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Anggaran: Rp. 7.700.000,00 Realisasi: Rp. 7.700.000,00 Persentase: (100,00%)	Kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Desa	12 Desa (100.00%)		

				2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 9.998.000,00 Persentase: (99,98%)	Kegiatan PKK Desa 12 Desa	12 Desa (100.00%)		
			i. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Anggaran: Rp. 36.500.000,00 Realisasi: Rp. 36.500.000,00 Persentase: (100,00%)	Terwujudnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
			j. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Anggaran: Rp. 95.090.000,00 Realisasi: Rp. 91.991.250,00 Persentase: (96,74%)	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Daerah 2 Kegiatan	2 Kegiatan (100.00%)		

		2) Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Anggaran: Rp. 7.200.000,00 Realisasi: Rp. 7.200.000,00 Persentase: (100,00%)	Fasilitasi Kegiatan FKUB6 Kegiatan	6 Kegiatan (100.00%)		
	k. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Anggaran: Rp. 2.000.000,00 Realisasi: Rp. 1.980.000,00 Persentase: (99,00%)	Fasilitasi Penyusunan APBDes Dan Perdes 12 Desa	12 Desa (100.00%)		
		2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Anggaran: Rp. 2.000.000,00 Realisasi: Rp. 2.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Pembinaan Administrasi Desa 12 Desa	12 Desa (100.00%)		

		3) Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Anggaran: Rp. 21.600.000,00 Realisasi: Rp. 17.670.000,00 Persentase: (99,36%)	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Dengan Siskeudes, Fasilitas Pencairan : ADD, DD, Pajak Retribusi, Dan Bantuan Keuangan, Fasilitas Pengelolaan Aset Desa 12 Desa	12 Desa (100.00%)		
		4) Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Anggaran: Rp. 4.590.000,00 Realisasi: Rp. 4.560.000,00 Persentase: (99,35%)	Terselenggarakan Pembinaan Perangkat Desa 12 Desa	12 Desa (100.00%)		

B A B V
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Untuk Tugas Pembantuan yang diterima di Kantor Kecamatan tidak ada / nihil.

B. TUGAS YANG DIBERIKAN

Untuk tugas yang diberikan di Kantor Kecamatan tidak ada / nihil.

BAB.VI

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Secara umum keadaan ketenteraman dan ketertiban serta keamanan selama tahun 2022 di Kecamatan Jumapolo kondusif dan terkendali.

Tugas yang dilaksanakan di Kecamatan Jumapolo adalah sebagaiberikut:

1. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. Forum Koordinasi;
2. Materi Koordinasi;
3. Instansi Vertikal yang terlibat;
4. Sumber dan Jumlah Anggaran;
5. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan;
6. Hasil dan manfaat koordinasi;
7. Tindak lanjut koordinasi;
8. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan: nihil

2. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Kecamatan Jumapolo sebagai pintu gerbang masuknya Wilayah Kabupaten Karanganyar dengan batas wilayah:

- Sebelah utara : Kecamatan Jumantono.
- Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Jatipuro.
- Sebelah Timur : Kecamatan Matesih.

Luas wilayah Kecamatan Jumapolo adalah 5.567,021 Ha, yang terdiri dari luas tanah sawah 1.833,893 Ha, dan luas tanah kering 3.733,128 Ha. Tanah sawah terdiri dari irigasi teknis 0,000 Ha, $\frac{1}{2}$ teknis 306,601 Ha, sederhana 973,301 Ha dan tadah hujan 553,991 Ha. Sementara itu luas tanah untuk pekarangan/bangunan 2.019,400 Ha, luas untuk tegalan/kebun 1.592,232 Ha., dan tanah lainnya 110,496 Ha.

Kecamatan Jumapolo terdiri dari 12 desa, 103 dusun, 137 dukuh, 112 RW dan 308 RT dengan jumlah penduduk 44.762 jiwa.

3. PENCEGAHAN DAN KESIAP SIAGAAN TERHADAP BENCANA

Untuk pencegahan bencana, berdasarkan kalender musim tahun-tahun sebelumnya bahwa pada musim kemarau rawan kebakaran, kekeringan, dan dalam menghadapi hari - hari besar, Idul Fitri, Idul Adha, Natal, dan tahun baru rawan keamanan sedang pada musim penghujan rawan banjir, pohon tumbang, rawan penyakit.

Dari Pemerintah Kecamatan lewat surat resmi maupun melalui rapat koordinasi diinformasikan kepada Kepala Desa untuk

disebarluaskan pada warganya tentang pencegahan terhadap bencana yang biasanya ada ditahun-tahun sebelumnya, antara lain melalui: Kegiatan Prokasih disepanjang jalur aliran sungai, PSN disetiap Rumah Tangga, kewaspadaan adanya bahaya banjir didaerah padat penduduk.

1. BENCANA YANG TERJADI DAN PENANGULANGANNYA

Kecamatan Jumapolo terdiri dari 12 desa. Untuk penanggulangan adanya banjir rutin tersebut, Forkompinca bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, linmas memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat untuk selalu waspada dan tanggap terhadap bencana banjir yang setiap tahun terjadi. Adapun bencana yang terjadi sebagaimana terlampir.

2. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN

Untuk penanganan bencana mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar berupa bahan makanan dan dari swadaya masyarakat dan perusahaan yang ada di Kecamatan Jumapolo.

3. SKPD yang menangani

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan golongan.

4. ANTISIPASI DAERAH DALAM MENGHADAPI KEMUNGKINAN BENCANA

Dengan adanya cuaca ekstrim yang terjadi saat ini, dimungkinkan berpotensi terjadinya bencana.

Dari Pemerintah Kecamatan lewat surat resmi maupun melalui rapat koordinasi diinformasikan kepada Kepala Desa untuk disebarluaskan pada warganya tentang pencegahan terhadap bencana yang biasanya ada ditahun-tahun sebelumnya, antara lain melalui:

Kegiatan Prokasih disepanjang jalur aliran sungai, PSN disetiap Rumah Tangga, kewaspadaan adanya bahaya banjir di daerah padat penduduk.

5. POTENSI BENCANA YANG DIPERKIRAKAN TERJADI.

Potensi Bencana yang setiap tahun tahun terjadi di Wilayah Jumapolo banjir dan untuk Itu Forkompinca bekerjasama dengan dinas terkait selalu mengingatkan warga untuk waspada terjadinya bencana tersebut.

Setiap terjadi kejadian Kepala Desa pada kesempatan pertama melapor ke Forkompinca, kemudian Forkompinca dan Staf mengecek ke TKP dan melaporkan Kabupaten. Dengan meningkatnya kewaspadaan di masyarakat Wilayah Jumapolo diharapkan apabila terjadi bencana segera dapat ditangani.

6. PENANGANAN KORBAN PASCA BENCANA

Penanganan korban paska bencana yang dilakukan Forkompinca Jumapolo antara lain:

1. Menyalurkan bantuan yang diterima baik itu dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar maupun swadaya dari masyarakat dan perusahaan yang ada di Wilayah Kecamatan Jumapolo.
2. Bekerja sama dengan puskesmas memberikan pelayanan kesehatan kepada korban bencana.
3. Diusahakan relokasi bagi wilayah yang rawan bencana.

4. PENYELENGGARAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi:

1. Gangguan yang terjadi;
2. SKPD / OPD yang menangani;
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan golongan;
4. Penanggulangan dan kendalanya;
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan;
6. Sumber dan Jumlah Anggaran.

BAB. VII
INOVASI DAN PENGHARGAAN

A. INOVASI

NO	Nama Inovasi	OPD	Diskripsi Inovasi
	NIHIL		

B. PENGHARGAAN

No	Nama Penghargaan	Instansi Penerima	Instansi Pemberi Penghargaan
	NIHIL		

BAB.VIII

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Jumapolo sebagai Perangkat Daerah telah berupaya melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksi, walaupun dalam pelaksanaan tugas tersebut tidak terlepas pula adanya kendala maupun hambatan. dari pelaksanaan tugas dimaksud secara umum dapat disimpulkan:

1. Antara Program Kerja yang telah disusun dengan pelaksanaannya tidak semua dapat sesuai hal ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor :
 - a. Adanya satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu pembangunan mushola kantor karena anggaran dan waktu tidak mencukupi.
 - b. Tidak tercukupinya anggaran untuk kegiatan-kegiatan pembangunan di kantor Kecamatan Jumapolo.
2. Dengan menjalin koordinasi dan menerapkan prinsip efisiensi, Camat berupaya maksimal melaksanakan tugas dan kewajibannya.

B. SARAN

Dari kondisi tersebut, selanjutnya memandang perlu mengajukan saran sebagai masukan dalam menyusun program dan strategi di waktu mendatang kepada Pemerintah Kabupaten sebagai berikut:

1. Dalam Penetapan Anggaran untuk kegiatan di Kecamatan Jumapolo perlu ditingkatkan agar berjalan dengan baik.
2. Perlu penambahan sarana Gedung kantor seperti Mushola, pagar kantor
3. Perlu adanya tambahan PNS Jabatan Fungsional Umum sebagai pelaksana sub / seksi yang membutuhkan.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas Camat Jumapolo Tahun Anggaran 2022 ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jumapolo, Januari 2023
CAMAT JUMAPOLO,

HARYANTO. SE, M.A.P
Pembina
NIP. 196705141979031011